

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia menunjukkan pergerakan yang baik. Laju pertumbuhan ekonomi secara nasional rata-rata per tahun cukup tinggi dan pendapatan per kapita selalu naik setiap tahunnya. Menurut Sasana (2009), peran sumber daya alam dan sumber daya manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena manusia yang memanfaatkan potensi sekeliling menjadi barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain. Namun pergerakan ekonomi di Indonesia ini belum tersebar secara merata, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi antar provinsi yang masih tinggi.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah, sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami gejolak sosial-politik dan hilangnya kepercayaan masyarakat serta investor asing terhadap Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis moneter ini adalah dengan cara mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk desentralisasi. Salah satu desentralisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut mengalami berbagai revisi yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 (Kemenkeu, 2015).

Pada awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer dana ke daerah sesuai asas “Money Follows Function”, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah maupun antar pemerintah pusat dengan daerah (Kemenkeu, 2015).

Prinsip dasar dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pengeluarannya (belanja), dengan demikian pemerintah daerah merespon desentralisasi dalam dua cara yaitu memperbesar penerimaan (*revenue side*) melalui intensifikasi dan perluasan pajak, retribusi daerah serta memanfaatkan sumber daya yang belum optimal melalui sistem bagi hasil, atau efektifitas sisi pengeluaran (*expenditure side*) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik (Arham, 2015).

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, serta

membentuk *hump-shape relation*, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran. Hal itu berarti jika desentralisasi fiskal rendah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan setelah mencapai titik tertinggi maka pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi negatif (Suwandi, 2015).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih cepat, karena daerah sendirilah yang mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Sehingga daerah diharapkan menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi (Anita et al., 2014). Menurut Mursinto dan Abdillah (2014), desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Pembelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaanya.

Saputra (2012) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Mursinto dan Abdilah (2014) yang membuktikan bahwa desentralisasi fiskal tidak mampu memberikan respon terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena derajat desentralisasi fiskal relatif belum cukup tinggi, derajat desentralisasi fiskal tumbuh lambat di kabupaten/kota yang memiliki penerimaan daerah yang kecil.

Namun menurut Miyasto dan Apriesta (2013) pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin besar pula, hal tersebut dipengaruhi adanya nilai PAD yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah.

Pengaruh desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar melalui sisi penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi fiskal, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan publik dari pusat kewenangannya sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian, kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan alokasi dana belanja daerah yang jauh lebih besar, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Dengan demikian, adanya peningkatan alokasi dana belanja daerah yang lebih besar berdampak positif terhadap peran pemerintah daerah melalui sisi pengeluaran (Kharisma, 2013).

Sejak era desentralisasi, pengaruh anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Menurut Yustisia (2016), dari sisi penerimaan daerah, sebagai perwujudan asas desentralisasi pemerintah daerah dapat melakukan pemanfaatan potensi daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan

pelaksanaan otonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencukupi kebutuhan fiskal serta dapat memenuhi kebutuhan publik (Kusuma, 2016).

Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat (Kusuma, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengamati pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 33 provinsi di Indonesia, bersama dengan pengaruh beberapa variabel lain, yakni Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional, dan Investasi.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh desentralisasi fiskal, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, penyerapan tenaga kerja, upah minimum regional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

## **C. Tujuan Penelitian**

Menghitung arah dan besarnya pengaruh desentralisasi fiskal, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, penyerapan tenaga kerja, upah

minimum regional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

##### 2. Bagi Dinas Penanaman Modal

Dapat memberikan bahan masukan terkait tingkat investasi, memberikan masukan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hal penanaman modal dalam jangka waktu panjang sebagai faktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

##### 3. Bagi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Sebagai bahan masukan terkait peningkatan Indeks Kemampuan Manusia dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

##### 4. Bagi Dinas Tenaga Kerja

Sebagai bahan masukan terkait tingkat penyerapan tenaga kerja dan penentuan jumlah UMR supaya terciptanya keseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja dengan tujuan untuk mengurangi dampak pengangguran di daerah.

##### 5. Bagi Dinas Sosial

Sebagai bahan masukan terkait tingkat jumlah penduduk miskin di daerah. Memberikan masukan dalam melakukan program-program untuk

mengurangi angka kemiskinan dengan tujuan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### 6. Bagi peneliti selanjutnya

Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya rujukan atau pustaka mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

### E. Metode Penelitian

#### E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Adapun, model ekonometrik yang akan digunakan merupakan modifikasi dari model Bashir (2011), yang spesifikasi akhirnya adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 \log JPM_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 \log PTK_{it} + \beta_5 \log UMR_{it} \\ + \beta_6 \log INV_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

- PE* = Pertumbuhan Ekonomi (%)
- DF* = Desentralisasi Fiskal (%)
- JPM* = Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
- IPM* = Indeks Pembangunan Manusia (%)
- PTK* = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)
- UMR* = Upah Minimum Regional (Rp)
- INV* = Investasi (Juta US\$)
- $\beta_0$  = Intersep
- $\beta_{1,2,3}$  = Koefisien regresi variabel independen
- $\epsilon$  = Komponen error
- i* = Propinsi ke *i*
- t* = Tahun ke *t*

#### E.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data panel gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2015-2019, yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal, jumlah penduduk miskin, penyerapan tenaga kerja, UMR, indeks pembangunan manusia, dan investasi 33 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari instansi-instansi pemerintah yang terkait yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka model yang digunakan adalah analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian terdahulu terkait determinan pertumbuhan ekonomi. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi peneliti yang selanjutnya.